

ANALISIS KAJIAN STANDARISASI ISI SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dana Sulistiyo K.¹, Herlan Puspa Negara², Yanuar Firdaus A.W.³

^{1,2,3} Kelompok Bidang Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Data

Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Telkom(d/h STT Telkom)

Jl. Telekomunikasi no : 1, Dayeuhkolot, Bandung, 40257

e-mail : ¹ dana@stt Telkom.ac.id , ² herlan_cayoo@yahoo.co.id , ³ yanuar@stt Telkom.ac.id

Abstrak

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2003 yaitu mengeluarkan panduan isi pembangunan situs web Pemerintah Daerah. Tapi sayangnya pembuatan panduan tersebut dibuat dengan cara menganalisis 90 situs Pemerintah Daerah, dimana kondisi pembangunan web Pemerintah Daerah yang saat itu hingga saat ini masih terkesan asal jadi saja.

Semestinya Pemerintah dalam membuat standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, bukan didasarkan dengan cara menganalisa 90 situs yang sebelumnya dibuat dengan inisiatif masing-masing dan terkesan sia-sia. Hal ini diperburuk lagi dengan tidak dijadikannya panduan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah dan pengembang dalam pembuatan isi situs web Pemerintah Daerah.

Penelitian ini membahas usulan standarisasi kebutuhan dari isi minimal situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang seharusnya dan sebaiknya ada pada sebuah web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebutuhan data dalam pengembangan sistem informasi.

Kata kunci : standarisasi , situs web, pemerintah daerah

1. PENDAHULUAN

Penerapan aplikasi web telah meluas ke berbagai bidang, mulai dari perbankan, asuransi, bisnis, manufaktur, pendidikan dan pemerintahan. Dalam dunia pemerintahan, aplikasi web digunakan dalam banyak hal diantaranya untuk publikasi informasi tentang daerah, potensi investasi, dan berbagai informasi lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak. Keharusan pembangunan situs web disetiap Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota merupakan tuntutan akan informasi yang cepat dan terupdate setiap waktu.

Web disetiap Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dapat membantu terbentuknya pemerintahan yang bersifat *Good Governance* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Manfaat yang didapat dari web di setiap Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota adalah adanya semangat keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat, ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan (transparansi) sehingga hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Sedangkan informasi berupa data potensi daerah, statistik dan peluang usaha disajikan untuk kalangan bisnis maupun investor, sebagai upaya daerah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2003 yaitu mengeluarkan panduan isi pembangunan situs web Pemerintah Daerah. Tapi sayangnya pembuatan panduan tersebut dibuat dengan cara menganalisis 90 situs Pemerintah Daerah, dimana kondisi pembangunan web Pemerintah Daerah yang saat itu hingga saat ini masih terkesan asal jadi saja. Semestinya Pemerintah dalam membuat standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, bukan didasarkan dengan cara menganalisa 90 situs yang sebelumnya dibuat dengan inisiatif masing-masing dan terkesan sia-sia. Hal ini diperburuk lagi dengan tidak dijadikannya panduan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah dan pengembang dalam pembuatan isi situs web Pemerintah Daerah.

Penelitian ini akan membahas usulan standarisasi kebutuhan dari isi minimal situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya dan sebaiknya ada pada sebuah web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah

Agar terciptanya informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka semestinya isi web Pemerintahan Daerah yang ada mengacu pada sistem perundang-undangan yang ada. Karena standarisasi isi web yang dilakukan pada penelitian ini tentang isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dilakukan acuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dikembangkan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan ini juga atas pertimbangan bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintahan Daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah serta dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.2 Isi Minimal Situs Web Pemerintah Daerah Versi DEPKOMINFO

Berdasarkan hasil pengamatan pada 90 (sembilan puluh) situs web Pemerintah Daerah dan hasil Jajak Pendapat pada 90 (sembilan puluh) pengelola situs website Pemerintah Daerah, isi minimal pada setiap situs web Pemerintah Daerah yang dibuat oleh DEPKOMINFO adalah sebagai berikut:

- 1) **Selayang Pandang**
Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, motto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
- 2) **Pemerintahan Daerah**
Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya.
- 3) **Geografi**
Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistik harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya.
- 4) **Peta Wilayah dan Sumberdaya**
Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional – Bakosurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna.
- 5) **Peraturan/Kebijakan Daerah**
Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.
- 6) **Buku Tamu**
Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan.

Selain isi minimal seperti tersebut diatas, DEPKOMINFO menyatakan bahwa isi lainnya yang akan disajikan pada suatu situs web Pemerintah Daerah diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Penanggungjawab Situs dan Manajer Situs web Pemerintah Daerah, tergantung pada kondisi setempat dan kesediaan data serta informasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan.

2.3 Analisis Usulan Isi Situs Web Pemerintah Daerah

Situs web Pemerintah Daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan *e-Government*. Sebagai output akhir dari SISFONAS. Seperti yang kita ketahui, pembuatan situs web Pemerintah Daerah merupakan awal (Tingkat I) pengembangan *e-Government* sebagai satu kesatuan dari kerangka konseptual SISFONAS di Indonesia.

Didalam pengembangannya, SISFONAS tidak saja menyangkut infrastruktur jaringan sebagai sarana komunikasi data dan aksesibilitas informasi tetapi juga menyangkut infostruktur (content) yang merupakan hal paling penting dari pengembangan SISFONAS. Untuk mendapatkan sistem informasi manajemen pemerintahan yang baik dan handal haruslah merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi dari semua bidang pemerintahan dan merupakan perpaduan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang yang paling tepat untuk dijadikan acuan dalam membangun standar isi situs web pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dari Undang-Undang yang terdiri dari 239 pasal tersebut, pasal-pasal yang sangat berhubungan dengan terciptanya isi situs web pemerintah daerah kabupaten/kota guna terciptanya SISFONAS yaitu Pasal 152, Pasal 153 dan Pasal 154.

2.4.1 Pasal 152

Isi dari pasal 152 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintah daerah;
 - c. Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Potensi sumber daya daerah;
 - f. Produk Hukum daerah;
 - g. Kependudukan;
 - h. Informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

2.4.2 Pasal 153

Isi dari pasal 153 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2.4.3 Pasal 154

Isi dari pasal 153 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan.

2.5 Restrukturisasi Data sebagai Basis Sisfonas

Saat ini begitu banyak aplikasi Sistem Informasi yang dibangun oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Aplikasi yang dibangun tersebut bertujuan untuk memudahkan Pemerintah dalam melakukan pengolahan data yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kesimpulan, dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Setiap aplikasi yang dibangun membutuhkan data-data yang akurat, data-data primer, maupun data-data derivative .

Oleh karena itu, Departemen Komunikasi dan Informatika memberikan gambaran tentang basis data dari Sistem Informasi yang ada saat ini.

Tabel 1: Tabel Kebutuhan Data bagi Sistem Informasi [1]

DATA PRIMER	Derivasi Pertama Data Primer	Derivasi ke n Data Primer
Data Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Sisfo Kependudukan • Sisfo Ketenagakerjaan • Sisfo Pendidikan • Sisfo Kesehatan • Social Security Number (SSN) • Dsb.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisfo Perpajakan Pusat • Sisfo Perpajakan Daerah • Sistem Keimigrasian • Sistem Pertahanan Keamanan • Sis Tel Nas • Sistem Transportasi Nasional • Dsb..
Data Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sisfo Geografi Nasional • Sisfo Pertanahan • Sisfo Pajak Bumi dan bangunan • Sisfo Tata Kota • Dsb.. 	
Data Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sisfo Keuangan Pemerintah • Sisfo Kepegawaian • Sisfo Anggaran • Sisfo Layanan Publik • Sisfo Legislatif • Sistem Hukum dan Perundang-undangan • Dsb.. 	

Dari data diatas nampak jelas bahwa data-data penting yang sangat dibutuhkan dan mendukung sistem informasi yang telah dikembangkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat belum terpenuhi jika kita melihat dari isi minimal situs web Pemerintahan Daerah yang telah dikeluarkan oleh DEPKOMINFO.

Berdasarkan data dan informasi yang dapat dianalisis dari kantor Badan Kepegawaian Nasional melalui situs www.bkn.go.id, pengambilan dan verifikasi data (data tenaga honorer) masih dilakukan secara manual dengan mengirimkan surat dan CD database ke dan dari tiap-tiap daerah untuk pengumpulan dan verifikasi data. Hal ini merupakan salah satu contoh kurang efektifnya pertukaran data di tingkat Pusat dan Daerah, karena membutuhkan waktu yang lama, tidak memanfaatkan Sistem Informasi yang telah ada dan tidak memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.

3. METODE PENELITIAN

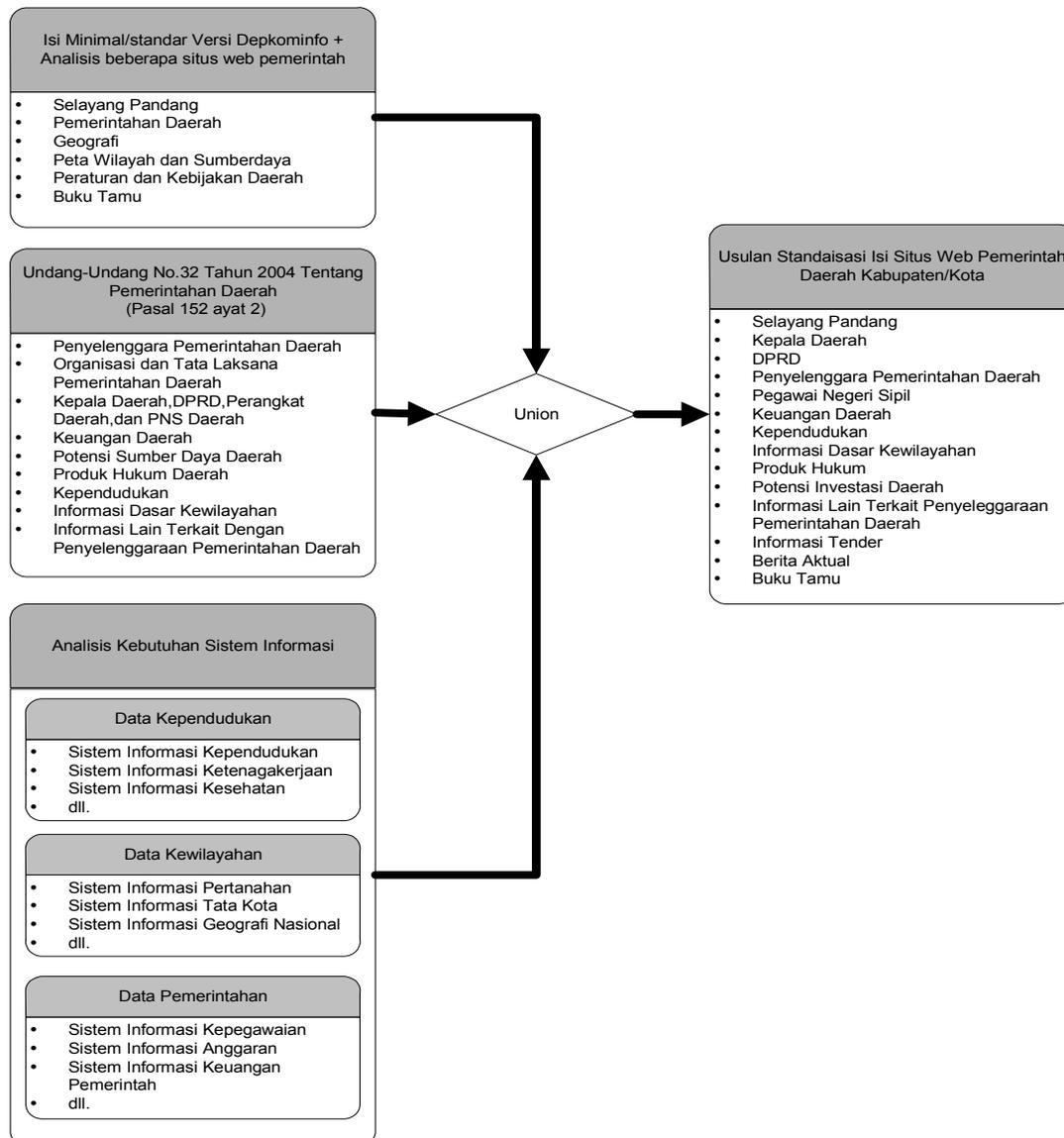
3.1 Metodologi Pembuatan Standar

Metode yang digunakan dalam membuat Usulan Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dengan menggunakan metode studi pustaka atau studi literatur dan metode observasi dengan langkah kerja sebagai berikut:

1. Studi Literatur:
 - a. Menganalisa Panduan Isi Situs Web Pemerintah yang dibuat oleh DEPKOMINFO dan menganalisa beberapa isi situs web Pemerintah Daerah yang telah ada.
 - b. Menganalisa Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada Pasal 152 ayat 2.
 - c. Menganalisa kebutuhan data bagi Sistem Informasi yang telah ada saat ini.
2. Metode observasi dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke Pemerintahan Daerah.
3. Melakukan penggabungan hasil kajian yang didapat, sehingga menghasilkan usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dilakukan kajian penilaian dari usulan standarisasi yang telah dibuat. Kajian penilaian dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten melalui Kantor PDE dan ARDA Kabupaten.

3.2 Alur Pendefinisian Standarisasi

Dari metode diatas, maka penulis menggambarkan alur pendefinisian standarisasi yang diusulkan adalah seperti pada gambar 1



Gambar 1 : Alur Pendefinisian Standarisasi Isi Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dilakukan perbandingan terhadap Usulan Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah ada. Perbandingan akan dilakukan terhadap 3 situs Pemerintah Daerah terbaik menurut penilaian yang telah dilakukan oleh The Indonesian ICT-institute [9].

Tiga Situs terbaik menurut The Indonesian ICT Institute tersebut yaitu :

- ❖ Pemerintah Kota Surabaya
- ❖ Pemerintah Kabupaten Bantul
- ❖ Pemerintah Kota Semarang

Dalam melakukan perhitungan penilaian perbandingan, maka akan diberikan skor tertentu dengan mengacu kepada analisis Skala Penilaian sebagai berikut :

Tabel 3 : Tabel Skala Penilaian [6]

Data Lengkap	Diberi skor 2
Data Tidak Lengkap	Diberi skor 1
Data Tidak Ada	Diberi skor 0

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana analisis perbandingan antara standarisasi isi situs web pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dibuat oleh peneliti dengan 3 situs terbaik tersebut diatas, maka akan dilakukan analisis korelasi hasil perbandingan.

Tabel 4 : Tabel Tingkat Korelasi [12]

Skor (%)	Tingkat Korelasi
0-25	Tidak Lengkap
26-50	Kurang Lengkap
51-75	Cukup Lengkap
76-100	Lengkap

Rumus perhitungan bobot skor yaitu sebagai berikut :

$$\text{Bobot skor} = \frac{\text{Jumlah Hasil Perbandingan}}{\text{Total skor}} \times 100\%$$

Tabel 5 :Tabel Hasil perbandingan ketiga situs dengan data usulan standarisasi

No	Usulan Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Status			Keterangan
			Lengkap	Tdk Lengkap	Tdk Ada	
1.	Selayang Pandang	Surabaya	✓			
		Bantul	✓			
		Semarang	✓			
2.	Kepala Daerah	Surabaya		✓		Hanya berisi data nama Walikota dan Wakil Walikota, alamat kantor dan alamat rumah.
		Bantul		✓		Hanya berisi data nama Walikota dan Wakil Walikota, alamat kantor dan alamat rumah.
		Semarang		✓		Hanya berisi data nama Walikota dan foto Walikota
3.	DPRD	Surabaya		✓		Tidak menjelaskan profil pimpinan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, fungsi , tugas dan wewenang anggota dewan, hak dan kewajiban anggota dewan, serta larangan anggota dewan.
		Bantul		✓		Tidak menjelaskan profil pimpinan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, fungsi , tugas dan wewenang anggota dewan, hak dan kewajiban anggota dewan, serta larangan anggota dewan. Data yang ditampilkan hanya nama Ketua dan Wakil Ketua DPRD, nama Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris perfraksi dan komisi serta anggotanya.
		Semarang		✓		Tidak menjelaskan fungsi , tugas dan wewenang anggota dewan, hak dan kewajiban anggota dewan, serta larangan anggota dewan.
4.	Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Surabaya		✓		Karena hanya berisi nama instansi, nama pimpinan dan alamat kantor dan alamat rumah pimpinan setiap instansi.
		Bantul		✓		Karena hanya berisi nama instansi, nama pimpinan dan alamat kantor
		Semarang		✓		Karena hanya berisi nama instansi dan alamat kantor
5.	Pegawai Negeri Sipil	Surabaya			✓	
		Bantul			✓	

6.	Keuangan Daerah	Semarang			✓	
		Surabaya			✓	
		Bantul			✓	
		Semarang			✓	
7.	Kependudukan	Surabaya		✓		Hal ini didasarkan karena data yang ditampilkan hanya data menurut kelompok umur dan jenis kelamin, data rata-rata anggota rumah tangga perwilayah dan data perbandingan rata-rata anggota rumah tangga perwilayah.
		Bantul		✓		Data yang ditampilkan tidak lengkap, hal ini disebabkan karena data yang ditampilkan hanya data total penduduk perkecamatan, jumlah penduduk laki-laki dan wanita perkecamatan, tingkat kepadatan penduduk yang ada di tiap-tiap kecamatan, serta persentase terbesar mata pencaharian penduduk di setiap kecamatan.
		Semarang		✓		Hal ini didasarkan karena data yang ditampilkan hanya data total penduduk, data menurut kelompok umur dan jenis kelamin
8.	Informasi Dasar Kewilayahan	Surabaya			✓	
		Bantul			✓	
		Semarang	✓			
9.	Produk Hukum	Surabaya	✓			
		Bantul	✓			
		Semarang	✓			
10.	Potensi Investasi Daerah	Surabaya			✓	
		Bantul	✓			
		Semarang	✓			
11.	Informasi Lain Terkait Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Surabaya		✓		Hanya berisi data renstra, Rancangan Kebijakan Umum APBD, dan Rancangan Prioritas dan Platform Sementara.
		Bantul		✓		Hanya berisi data Rencana Strategis Kabupaten Bantul
		Semarang			✓	
12.	Berita Aktual	Surabaya	✓			
		Bantul	✓			
		Semarang	✓			
13.	Buku Tamu	Surabaya	✓			
		Bantul	✓			
		Semarang	✓			

Total skor : $13 \times 2 = 26$

Dari perbandingan tersebut diatas maka dapat dilakukan penilaian terhadap ketiga situs terbaik tersebut dengan kelengkapan data dari usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat.

Tabel 6 : Tabel Penilaian Perbandingan dengan 3 Situs Terbaik

No	Nama situs	Skor	Keterangan
1.	Surabaya	Bobot skor = $\frac{13}{26} \times 100\% = 50$	Kurang Lengkap
2.	Bantul	Bobot skor = $\frac{15}{26} \times 100\% = 57,69$	Cukup Lengkap
3.	Semarang	Bobot skor = $\frac{16}{26} \times 100\% = 61,53$	Cukup Lengkap

Dari tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa banyak data-data yang dibutuhkan bagi Sistem Informasi belum dipenuhi secara maksimal oleh ketiga situs tersebut diatas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan tujuan penelitian serta perumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan usulan *National Framework* yang dibuat dikatakan **LAYAK** dan **TEPAT** untuk menjadi masukan bagi Pemerintah dan pengembang situs web Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dilakukan kajian penilaian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat melalui Kantor PDE dan ARDA Kabupaten Lahat.
2. Dari hasil perbandingan usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 situs terbaik versi The Indonesian ICT Institute yang ada pada Bab 4, disimpulkan bahwa sebagian besar situs tersebut belum memenuhi data-data yang telah diusulkan dalam usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Saran

Setelah memberikan usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah dan usulan *National Framework* bagi infostruktur, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Pusat dalam hal ini DEPKOMINFO segera membuat standarisasi atau panduan isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota versi 2 atau versi 1.1-nya.
2. Diharapkan pihak-pihak yang terkait langsung dalam penyelenggaraan SISFONAS untuk dapat memfasilitasi usulan yang penulis buat sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Komunikasi dan Informasi.,2002, *Sisfonas 2010: Sisfonas sebagai Tulang Punggung Aplikasi E-Government*.
- [2] Departemen Komunikasi dan Informasi Deputi Bidang Telematika,2002, *Kerangka Konseptual Sisfonas versi 1.0* .
- [3] Departemen Komunikasi dan Informasi,2003, *Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah*.
- [4] Departemen Komunikasi dan Informatika, 2003 , *Materi Penyuluhan SIMDK dan Telematika Bidang Hukum Tingkat Daerah*, Jakarta.
- [5] Redaksi Basimpekab Kutai Timur, 2005 , *Kebijakan dan Strategi Pengembangan E Government*, Kutai Timur , Buletin E Government Kutai Timur.
- [6] Sugiono,2003, *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta:Bandung.
- [7] Supriansyah,Haris dan Kartoyo, 2006 , *30 Menit Menjadi Webmaster*, Bandung, OASE Mata Air Makna Gedung Bumi Padjajaran.
- [8] Soendjojo,Hadwi,*Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah*,
http://www.depkominfo.go.id/?pid=egov&cid=egov_001.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [10] The Indonesian ICT Institute. *Peringkat Web Total Pemda Tingkat II*.2007.
<http://www.eii-forum.org>
- [11] I Putu Agus Swastika, M.Kom. , *Ada Apa dengan e-Government?*,
<http://www.egovindonesia.com/index.php/artikel/6> ,
diakses 9 November
- [12] Dean J.Champion. *Basic Statistic For Social Research*.Newyork:Macmilan Publish Ci.Inc.1991.